

MENELISIK HUTAN DESA (PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT)

Fajri Rahman¹, Ade Irwandi²
Universitas Andalas^{1,2}
frahman@soc.unand.ac.id¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menjelaskan pengelolaan hutan desa yang dibentuk dalam kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi kritis. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan hutan desa memperkuat legitimasi perlindungan hutan gambut atas desakan hutan produksi yang mengelilinginya. Sehingga, masyarakat melalui hutan desa secara tidak langsung mempertahankan keberadaan hutan lindung gambut. Selain itu, fungsi hutan lindung gambut juga dibuka akses (ruang kelola) kepada masyarakat melalui perhutanan sosial. Sehingga, bukan hanya tujuan untuk melindungi hutan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Simpulan penelitian bahwa konsep sosial muncul pada tahun 1978 sebagai "hutan untuk masyarakat" (forestry for people). Pada tahun 1990-an, gagasan Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas (PHBM) muncul, yang mengarah pada era reformasi saat ini. Konsep sosial bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Namun, ia menghadapi tantangan seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dan fokus pada aspek produk dan lingkungan.

Kata Kunci: Hutan Desa, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Perhutanan Sosial

ABSTRACT

The purpose of this research is to explain the forest management of the village that is formed in the HLG (Protected Wood) area of the Buluh River in Jambi Province. The research uses a critical ethnographic approach. The results show that the presence of the Village Forest strengthens the legitimacy of the protection of the forest against the pressure of the Production Forest that surrounds it. Thus, the people through the village forests indirectly maintain the existence of the forest. In addition, the shelter forest function also opens access (government space) to the community through social forestry. So, it's not just about protecting the forests but also improving the well-being of the local people. The research concluded that the social concept emerged in 1978 as "forests for society" (forestry for people). In the 1990s, the idea of Community-based Forest Management (PHBM) emerged, leading to the current era of reform. The social concept aims to increase participation and improve the well-being of communities in forest management in Indonesia. However, it faces challenges such as lack of community involvement and focus on product and environmental aspects.

Keyword: Community Based Forest Management, Social Forestry, Village Forest.

PENDAHULUAN

Provinsi Jambi memiliki hutan yang besarnya sekitar 60% luas wilayahnya. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi seluas 2.098.535 Ha. Luas kawasan hutan tersebut, terdapat empat fungsi kawasan, yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) seluas 685.471 ha, Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 179.588 ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 258.285 ha, dan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 963.792 ha. Kawasan hutan lindung yang berada di Jambi memiliki keragaman, salah satunya hutan lindung gambut (BRG, 2017).

HLG atau Hutan Lindung Gambut di provinsi Jambi terhampar di tiga kabupaten, yaitu: (1) Kabupaten Muaro Jambi seluas 34.702,600 ha terdiri dari HLG Air Hitam Dalam - Air Hitam Laut seluas 27.404,600 ha dan HLG Sungai Londerang seluas 7.298 ha; (2) Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 21.473,800 ha yang merupakan HLG Bram Hitam; dan (3) Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 23.748 ha terdiri dari HLG Sungai Buluh seluas 17.721 ha dan HLG Sungai Londerang seluas 6.027 ha (Lisnawati, 2021; Nurjanah, 2013; Pemerintah Provinsi Jambi, 2015; Putra, 2022). Luasnya mencapai 56.200, 148 ha dan merupakan urutan ketiga di pulau Sumatra yang memiliki hutan lindung gambut (Nurjanah, 2013; Zainuddin, 2019).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah yang memiliki hutan lindung gambut yang berada di sisi timur Provinsi Jambi (BPS, 2023). Diantaranya terdapat Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Londerang seluas 6.027 ha dan Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh seluas 17,721 ha. HLG Londerang sebenarnya memiliki

luas 13.325 ha yang terbagi atas dua kabupaten. Salah satunya termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Kecamatan Mendahara Ulu tepatnya di Desa Kota Kandis Dendang. Namun, kawasan HLG Sungai Londerang digunakan untuk skema perhutanan sosial hanya seluas 4.405 ha berdasarkan SK.705/Menhut-II/2014.

Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh merupakan suatu kawasan gambut berstatus hutan lindung di Provinsi Jambi. Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Mendahara Ulu dengan luas 17.721 ha (Agustini, 2018). Keberadaannya ada dalam tiga desa yaitu Desa Pematang Rahim, Desa Sinar Wajo dan Desa Sungai Beras. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan. Namun, perlu disadari bahwa di dalam hutan bukan hanya keragaman hayati tetapi juga ada masyarakat yang hidup berdampingan dan ketergantungan dengan hutan.

Atas dasar itu, keberadaan masyarakat yang berada di dalam desa perlu dipertimbangkan dan memberikan akses untuk pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian hutan lindung. Maka perlu dibentuk mekanisme yang sesuai melalui Perhutanan Sosial Berbasis Masyarakat (PHBM) (Veriasa dkk., 2021). Mekanisme ini juga disebut dengan Perhutanan Sosial diatur dalam SK.P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/20. Dengan keluarnya peraturan Menteri Kehutanan tersebut, maka bagian hutan yang berada di tiga desa dapat diberikan akses pada masyarakat untuk dikelola namun tetap menjaga kelestarian ekosistem, perlindungan dan pemanfaatan.

Melalui skema perhutanan sosial, maka dibentuklah Hutan Desa. Dimana pengelolaannya diberikan wewenang pada masyarakat melalui Lembaga

Pengelolaan Hutan Desa (LPHD). Sehingga statusnya berubah menjadi Hutan Desa (HD). Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa, bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari, hutan negara dapat dikelola untuk kesejahteraan desa melalui Hutan Desa. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hal. Maka atas dari itu dibentuk lembaga yang bertugas mengelola yaitu LDPH. LDPH atau Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa atau bisa disebut juga dengan LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Dengan Pendekatan etnografi memungkinkan untuk menunjukkan gambaran secara keseluruhan dari realitas tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tidak terstruktur, observasi dan pendokumentasian. Dalam penarikan informan juga ditetapkan beberapa informan pelaku, dimana terlibat langsung dengan topik penelitian. Informan terdiri dari ketua Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD), ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) tokoh masyarakat, perangkat desa dan pendamping KKI Warsi.

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di *coding* dan dielaborasi. Setelah itu, akan dianalisis dengan melihat data yang bertentangan dan saling mendukung. Triangulasi data juga digunakan agar tidak menjustifikasi dalam analisis tunggal (interpretasi emik dan etik).

HASIL PENELITIAN

Menelisik Desa Sungai Beras

Sejarah Desa Sungai Beras memiliki cerita pembentukan daerahnya. Awal mula pembukaan Desa Sungai Beras ini pertama kali oleh H. Kusnan pada tahun 1972 di mana nama dusun saat itu masih Kuala Mendahara. Menurut cerita masyarakat mengenai toponimi dari nama desa berasal dari dua pandangan.

Pandangan pertama, nama desa diambil dari nama sungai kecil yang merupakan anak sungai dari sungai Mendahara yang terdapat ditengah-tengah desa. Pandangan kedua yaitu, nama desa diambil dari potensi pertanian padi. Karena dahulu masyarakat banyak menjadi petani padi dan menghasilkan beras maka disebut dengan desa Sungai Beras. Sehingga, sampai saat ini nama itu melat dan secara administrasi dipakai sebagai nama desa dengan nama Sungai Beras. akan tetapi pembentukan awal desa memiliki sejarah dimana desa ini merupakan hutan yang lebat. Sehingga ada orang yang ingin mengolah hutan untuk mencari penghidupa baru.

Desa Sungai Beras secara definitif berdiri pada tahun 2006. Desa ini merupakan pemekaran dari Desa Mendahara Ulu. Secara administratif Desa Sungai Beras termasuk dalam wilayah Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi. Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan \pm 20 Km, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dan sungai (BRG,

2017). Jika melalui jalan darat lebih kurang 60 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Namun, jika menggunakan transportasi sungai waktu tempuhnya lebih cepat 20 menit. Jarak ke Ibukota Kabupaten \pm 75 km ditempuh dengan waktu lebih kurang 2 Jam dan \pm 94 Km dari ibukota propinsi yang ditempuh lebih kurang 2 jam 30 menit perjalanan darat dengan kendaraan roda dua dan roda empat (Kepala Desa, 2019). Desa ini berlokasi di sepanjang Sungai Mendahara. Jika dilihat dari udara atau peta, posisi Sungai Mendahara ini keberadaannya persis membelah desa ini.

Secara umum wilayah Kabupaten Tanjung Jabung beriklim tropis, begitupun dengan Desa Sungai Beras. Pada tahun 2013, suhu udara rata-rata 27,0° - 28,1 °C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 33,4 °C dan suhu udara minimum terjadi pada bulan Desember sebesar 23,8 °C. Kelembaban udara relatif tinggi rata-rata berkisar antar 82% s/d 89%. Sedangkan berdasarkan tipe iklim Smith dan Ferguson, wilayah ini termasuk tipe iklim A, dengan curah hujan rata-rata 189,8 mm/bulan pada tahun 2013 (BPS, 2023).

Secara umum, pembagian musim berdasarkan pengetahuan masyarakat lokal terbagi dalam tiga kategori. Pertama, pembagian musim secara menyeluruh terdiri dari tiga musim yaitu musim kemarau di bulan April – Agustus dan musim penghujan di bulan Oktober-Februari, serta musim pancaroba (pergantian musim) yang menandai peralihan musim kemarau ke musim hujan maupun sebaliknya. Musim kemarau dan musim hujan umumnya diperhatikan oleh masyarakat yang memiliki mata pencaharian dengan bercocok tanam. Kedua, pembagian musim berdasarkan pasang surut air laut

dan gerakan angin. Masyarakat lokal mengenal angin barat dan angin selatan. Angin selatan merupakan saat dimana nelayan pergi melaut dan hasil tangkapan melimpah. Sedangkan angin barat saat dimana nelayan tidak berangkat melaut kecuali di pesisir. Pada saat angin barat, sering terjadi badai yang menghalangi nelayan untuk melaut. Ketiga, musim panen besar, panen kecil dan trek. Pembagian musim ini umumnya digunakan oleh masyarakat yang memiliki mata pencarian di bidang perkebunan, khususnya yang di lahannya ditanami tanaman serbasama, bukan campursari, misalnya seperti perkebunan sawit, pinang, kopi dan kelapa. Panen besar jatuh pada puncak musim penghujan, panen kecil jatuh pada bulan antara puncak musim kemarau dan puncak musim penghujan, sedangkan musim *trek* (masa tidak panen) jatuh pada puncak musim kemarau. Puncak musim penghujan dan musim kemarau biasanya hanya berlangsung 3-4 bulan. Puncak musim penghujan dan puncak musim kemarau akan sangat berpengaruh pada suplai air bagi tanaman. Pada perkebunan campursari, pengaruh musim tidak terlalu terlihat karena terdapat keanekaragaman hayati yang lebih baik dibandingkan perkebunan serbasama.

Berdasarkan monografi desa, luas desa ini adalah 113.85 km² atau presentase dari luas kecamatan sekitar 21,77% (BPS, 2023). Wilayah desa ini bagian timur dan baratnya terbelah oleh Sungai Mendahara yang dipengaruhi oleh pasang surut dan langsung mengalir menuju laut pantai timur Sumatera. Hingga saat ini sungai tersebut masih menjadi jalur transportasi utama masyarakat di desa. Secara administratif, desa ini berbatasan dengan: (1). Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Merbau dan Desa Bakti Idaman. (2). Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sinar

Wajo. (3). Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pematang Lumut. (4). Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pandan Sejahtera.

Desa ini terbagi dalam enam dusun dan 23 RT, diantaranya: (1). Dusun Karya Bakti yang terdiri dari RT 01 Kampung Baru, RT 002 Alamsyah, RT 003 Parit Alamsyah, RT 004 Sungai Buluh. (2). Dusun Sungai Beras II yang terdiri dari RT 005 Sungai Budaya, RT 006 Parit Senang, RT 017 Sungai Nibung. (3). Dusun Sungai Beras I terdiri dari RT 007 Pagar Indah, RT 008 Teluk Pagar, RT 009 Parit Lapis Teluk Pagar, RT 018 Parit Selamat (Muhibah). (4). Dusun Gudang Indah terdiri dari RT 010 Parit Gudang, RT 019 Sungai Papan. (5). Dusun Sungai Beringin terdiri dari RT 011 Sungai Beringin, RT 012 Sungai Apok, RT 020 Parit Jawa Timur, RT 021 Parit Lapis Jawa Timur, RT 022 Sungai Gudang, RT 023 Parit Sinar Sulawesi. (6). Dusun Setia Budi terdiri dari RT 013 Kanal Lapis Buta-Buta, RT 014 Parit Harapan Indah, RT 015 Parit Antara, RT 016 Teluk Perancis.

Desa Sungai Beras memiliki penduduk yang cukup banyak. Tercatat Jumlah penduduk Desa Sungai Beras berjumlah 3.470 jiwa dengan perbandingan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.799 jiwa dan perempuan sebanyak 1.671 jiwa (BPS, 2023). Adapun jumlah penduduk Desa Sungai Beras sebanyak 916 KK yang tersebar di 6 dusun terdiri dari 853 KK laki-laki dan 63 KK perempuan (Kepala Desa, 2019). Penduduk yang berada di Desa sungai Beras memiliki keberagaman etnis. Melalui keberagaman etnis yang berada di Desa Sungai Beras, maka bahasa yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari bukan bahasa ibu (bahasa asli) melainkan bahasa Melayu Jambi. Hal ini dilakukan agar komunikasi antar masyarakat yang beragam dapat dilakukan tanpa memandang etnis.

Terlebih lagi, bahasa Melayu digunakan sebagai bentuk penyesuaian diri mereka yang bukan etnis Melayu beradaptasi di tanah Melayu.

Namun, bagi masyarakat yang bukan etnis Melayu, tetap mengerti bahasa ibu mereka terutama etnis Jawa. Mereka masih menggunakan komunikasi melalui bahasa Jawa sesama orang Jawa. Begitu juga etnis Banjar. Tapi menurut Bapak H (57 tahun) seorang beretnis Banjar, mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Melayu ketimbang bahasa Banjar dan banyak yang sudah lupa bahasa Banjar.

Sebagai desa yang berada di pinggiran sungai, Desa Sungai Beras memiliki sejarah tersendiri yang berkaitan dengan etnis atau suku yang mendiami desa ini. Ketika wilayah desa ini pertama kali dibuka pada akhir tahun 1960-an, suku yang pertama hadir adalah Jawa. Namun, karena desa ini berasal dari Desa Mendahara Ilir (desa yang berada di muara Sungai Mendahara dekat laut Pantai Timur Sumatera), maka sebenarnya diawali dengan kehadiran Suku Melayu. Namun seiring waktu berjalan, bergabung Suku Bugis, Banjar dan Jawa. Khusus untuk Desa Sungai Beras ini, karena yang membuka wilayah desa ini yang pertama adalah Suku Jawa, suku yang banyak penduduknya adalah Jawa.

Masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Beras memiliki keberagaman etnis. Hal ini dipicu dengan laju perpindahan penduduk pada zaman pasca kemerdekaan. Dimana banyaknya etnis yang berada di pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi mencari suka baru untuk melanjutkan kehidupan ke darah lain yaitu pulau Sumatera. Mereka melakukan perpindahan bukan tanpa sebab. Beberapa penduduk Sungai Beras mengatakan nenek moyangnya (Nenek, Kakek dan orangtuanya) pindah dari kampung halaman ke Pulau Sumatera

karena banyaknya perperangan, konflik dan akses terhadap mata pencaharian di daerah asalnya. Sehingga mereka pergi meninggalkan tanah asalnya dan merantau ke negeri orang lain.

Selain itu, beragamnya penduduk di Sungai Beras juga disebabkan oleh para pekerja di perusahaan sawit. Desa Sungai Beras dikelilingi oleh beberapa perusahaan HTI maupun konsesi lahan sawit, sehingga para pekerja yang merupakan banyak dari etnis Jawa, maka mereka tidak kembali ke daerah asal mereka, melainkan menetap di desa sekitaran perusahaan. Seperti kisah Bapak S (70 tahun) merupakan warga desa Sungai Beras yang berasal dari etnis Jawa. Dia menceritakan mengapa dia bisa tinggal di desa Sungai Beras karena orang tua laki-lakinya merupakan pekerja perusahaan dan ketika masih kecil dia dibawa oleh ayahnya sekitar tahun 1987. Setelah itu, Ayahnya membuka lahan di desa ini dengan sistem *pancung alas*, maka dia setelah dewasa menetap disini hingga saat ini (wawancara 25 Oktober 2023).

Berbeda dengan cerita Bapak H (57 tahun) seorang warga Sungai Beras yang merupakan etnis Banjar. Beliau datang ke desa ini dibawa oleh orang tuanya yang berasal dari Tembilahan bersama beberapa rombongan orang Banjar lainnya untuk mencari penghidupan baru. Sehingga, pada akhirnya mereka menetap disini hingga saat ini (wawancara 25 Oktober 2023).

Memang benar, secara fakta geologis daerah Jambi merupakan tanah asal orang Melayu, namun Desa Sungai Beras merupakan bukan daerah pemukiman orang Melayu melainkan hutan belantara dahulunya. Sehingga, setelah kedatangan orang Banjar, Jawa dan etnis lainnya barulah desa Sungai Beras berdiri. Etnis yang ada di Desa Sungai Beras didominasi oleh etnis Banjar dan Jawa dan sebahagian etnis

Bugis, Melayu Jambi dan Batak. Meskipun suku Melayu merupakan diakui sebagai *native ethnic* di Provinsi Jambi, namun sebagian besar perkampungan di Desa Sungai Beras pada awalnya tidak dibuka oleh suku Melayu. Sebagai contoh Parit Teluk Pagar di Dusun Sungai Beras I dan Parit Jawa Timur di Dusun Sungai Beringin dibuka oleh masyarakat dari suku Jawa, Parit Antara dan Parit Teluk Perancis di Dusun Setia Budi dibuka oleh masyarakat dari suku Bugis. Dari yang diketahui, hanya Parit Alamsyah dan Parit Harapan Indah di Dusun Setia Budi dibuka oleh masyarakat dari suku Melayu.

Suku Kerinci, suku Minang dan Suku Batak tidak diketahui pernah membuka lahan di Desa Sungai Beras. Umumnya masyarakat ketiga suku ini datang setelah adanya perkampungan. Pada gelombang pertama kedatangan masyarakat suku Kerinci, Minang, dan Suku Batak, mereka memiliki mata pencarian sebagai guru dan tenaga pemerintahan. Kini selain sebagai guru dan tenaga pemerintahan, terdapat beberapa masyarakat suku Kerinci, suku Minang dan suku Batak yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dan petani.

Menurut sejarah pembentukan perkampungan di areal Desa Sungai Beras, keempat suku merupakan suku-suku yang berperan dalam membuka lahan di kawasan hutan yang kini menjadi Desa Sungai Beras. Berdasarkan mata pencahariannya, masyarakat dari empat suku ini memiliki mata pencarian yang beragam, seperti berkebun, berdagang, nelayan, pegawai pemerintah dan pekerjaan lainnya. Secara rinci, ada 16 bidang kerja yang menjadi mata pencaharian/pekerjaan penduduk Desa Sungai Beras. Dari 16 mata pencaharian tersebut, satu mata pencaharian yang paling dominan adalah

sebagai petani/pekebun/peternak. Adapun kaum perempuan, pekerjaan yang paling dominan adalah mengurus rumah tangga. Urusan Rumah Tangga (URT) tidak dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan ini tidak menghasilkan tambahan finansial bagi keluarga. Pekerjaan URT umumnya dilakukan oleh kalangan perempuan. Jika kita asumsikan bahwa URT merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan tambahan ekonomis.

Masyarakat sekitar melakukan penebangan dengan sistem tebang pilih dan hanya kayu yang berukuran besar saja yang ditebang. Selain itu, masyarakat mencari ikan dengan memancing dan memasang taju dan lukah. Hal ini dimungkinkan karena pada masa tersebut, lahan gambut selalu digenangi air sepanjang tahun. Bahkan pada musim kemarau panjang, masih terdapat beberapa lubuk yang berair dan terdapat ikan. Selain memancing, masyarakat sekitar juga memanfaatkan hasil hutan yang ada dalam skala terbatas sesuai kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan hasil hutan secara sederhana misalnya: mencari rotan untuk membuat ambung, mencari daun rumbia dan pandan duri untuk dibuat tanggui, tikar atau pun bakul, menanam kangkung rambat yang banyak tumbuh di lubuk, menyadap enau/aren untuk diambil airnya ataupun dijadikan gula aren. Tidak dapat dipungkiri, masyarakat di sekitar hutan juga menebang pohon untuk kebutuhan membuat rumah, perabot, ataupun untuk dijual kepada pembeli. Beberapa lahan hutan yang dapat disiangi tidak dengan membakar kadang ditanami labu dan jagung yang hasilnya sangat memuaskan. Labu tumbuh di lahan gambut yang tidak tergenangi memiliki buah yang besar dan segar. Lahan gambut yang terbengkalai dan selalu berair dalam area yang luas seringkali ditumbuhi tanaman purun,

tanaman rawa ini telah dimanfaatkan masyarakat sekitar lahan gambut untuk membuat tikar, topi, bakul, tas, dan berbagai aksesoris lainnya. Pemanfaatan terbatas lainnya misalnya dengan mencari getah damar yang digunakan sebagai dempul untuk pakal perahu dan perahu motor.

Masyarakat sekitar lahan gambut umumnya mengelola lahan gambut dengan seleksi yang cukup ketat. Pada masa pohon dan hasil hutan masih berlimpah, masyarakat pantang menebang pohon yang masih terlalu muda dan kecil. Hal ini memungkinkan pohon-pohon kecil dapat tumbuh menjadi besar.

Mata pencaharian penduduk pada masa itu hanya bertani padi, hutannya masih luas tanpa ada penjamahan dari pihak luar, penduduk desa memanfaatkan hutan hanya untuk bertani dan mengambil kayu sekadarnya yang diperuntukan rumah, jembatan dan kebutuhan lokal lainnya. Sejarah awal mula disebut Desa Sungai Beras dilatarbelakangi kondisi ekosistem desa yang dahulunya banyak sungai kecil yang digunakan petani untuk mengatur pengairan persawahan mereka, sehingga hasil dari pertanian penduduk semakin meningkat dan kesuburan tanah menjadi bagus dan cocok untuk persawahan. Penduduk di sini banyak menghasilkan beras sehingga Desa Sungai Beras terkenal dengan pusat penyimpanan beras untuk dibawa ke Kota Jambi.

Pada awal tahun 1974 perkembangan penduduk sudah mulai ramai yang datang dari luar desa untuk menetap di Desa Sungai Beras tersebut, warga yang datang dari luar di antara lain ada yang dari Jawa Timur, Bugis dan sekitarnya. Kehadiran pendatang tersebut sangat menambah penduduk Sungai Beras, mereka yang datang semata-mata ingin bertani dan menetap tinggal di Desa Sungai Beras. Masuk

pada tahun 1980 penduduk desa sangat ramai dan pembangunan sarana prasarana desa pun terus mulai dibangun, seperti bangunan Sekolah Dasar yang didirikan pada tahun 1982. Pembangunan infrastruktur pendidikan dilanjutkan pada tahun 2001, saat dibangun Madrasah Tsanawiyah. Pada periode pemerintahan PJs, Kepala Desa, Usman, beberapa pembangunan infrastruktur mulai dilakukan seperti jalan, jembatan penghubung, dan SMP Perubahan lanskap alam Desa Sungai Beras juga terjadi akibat dua faktor, yakni perubahan yang disebabkan oleh bencana alam, dan perubahan yang disebabkan pergantian komoditas ke monokultur kelapa sawit. Sebelumnya, di tahun 1985, terjadi banjir besar dengan adanya banjir yang melanda desa tersebut persawahan pun hancur dan sungai kecil pun tertutup oleh tanah yang dibawa arus banjir, warga mulai merencanakan untuk mengalihkan pertanian mereka dari sawah ke pertanian Pinang, kelapa, tanaman mereka banyak yang diganggu oleh babi hutan sehingga pertanian tidak nyaman tapi terus saja tetap bertani. Pada tahun 2004, komoditas kelapa sawit mulai marak ditanami pada lokasi Desa Sungai Beras.

Masyarakat yang datang ke desa Sungai Beras memang bertujuan untuk mencari mata pencaharian baru yaitu bertani. Sehingga, di desa ini merupakan penghasil beras. Namun, seiring berkembangnya mata pencaharian dan masuknya etnis lain ke desa Sungai Beras mata pencaharian petani padi mulai bergeser ke kelapa. Menurut Bapak H (56 tahun) pergeseran mata pencaharian masyarakat dari padi ke kelapa dipengaruhi oleh etnis Bugis yang mulai menanam kelapa di kebun mereka untuk dijadikan kopra. Sehingga, banyak sawah tidak lagi diolah dan mulai ditanam kepala. Hal ini juga disebabkan

orientasi kelapa dapat menghasilkan uang ketika dijual di luar desa. Sedangkan padi hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan rumah tangga.

Hal lain yang menyebabkan menanam padi ditinggalkan karena pada musim tanam padi curah hujan cukup tinggi dan sering banjir dari luapan sungai mendahara. Diketahui bahwa dari tahun 1972-1998 masyarakat sebagian masih ada yang menanam padi menjelang masuk tahun 1989 masyarakat tidak berminat lagi menanam padi dikarenakan tidak bagus lagi/ tidak mau jadi lagi, mereka mulai berpindah/beralih ke perkebunan, banjir melanda Desa Sungai Beras selama 15 hari air pasang surut air laut, dengan lama waktu satu minggu naik satu minggu turun.

Diketahui bahwa pada awal tahun 2000-an menanam padi benar-benar ditinggalkan oleh masyarakat dan beralih ke sektor perkebunan. Hal ini juga disebabkan karena sudah mulainya banyak potensi perkebunan yang dapat dikembangkan. Terlebih lagi beberapa perusahaan sawit sudah mulai masuk di Jambi. Diperkebunan mulai ditanam kepala dan pinang serta sudah mulai menanam sawit. Kebun-kebun masyarakat Sungai Beras merupakan kebun campur sari, dimana ada beberapa tanaman yang ditanam berupa tanaman komoditas dagang dan tanaman pangan. Namun, tanaman yang paling banyak ditanam setelah harga kelapa anjlok adalah pinang.

Potensi unggulan dari desa ini adalah Pinang. Perkiraannya 90% lebih pendapatan utama masyarakat desa ini dari Pinang (Sahputri, 2020).

Namun, ketika harga pinang juga turun, masyarakat mulai menanam sawit. Sawit yang pada saat itu sangat menjanjikan ditambah lagi dengan banyaknya perusahaan sawit disekitar kampung mereka. Sehingga, mereka

terpengaruh untuk menanam sawit hingga saat ini. walaupun begitu tumbuhan pinang dan kelapa tidak ditebang, tapi tetap dipertahankan karena masih bernilai ekonomis. Untuk menanam sawit masyarakat membuka lahan baru. Tapi tidak dengan tanaman padi benar-benar sudah ditinggalkan.

Potensi pertanian dan perikanan sangat minim di desa ini. Dulu sebelum tahun 1990-an, memang desa ini menjadi salah satu lumbung padi. Hanya saja saat ini tidak ditemukan lagi masyarakat yang menanam padi. Begitupun dengan perikanan, tidak ada potensi karena air sungai di desa dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sehingga sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan budidaya perikanan.

Peternakan juga tidak terlalu berpotensi karena sangat jarang sekali ditemukan ternak. Menurut beberapa masyarakat yang diwawancarai, sulitnya pakan menjadi alasan mereka tidak beternak hewan. Namun, untuk sektor kehutanan sepertinya cukup berpotensi dikembangkan. Apalagi desa ini memiliki kawasan Hutan Desa yang izinnya didapatkan dari Menteri Kehutanan pada tahun 2014 lalu seluas 2200 Ha. Potensi sektor kehutanan ini berasal dari kegiatan agroforestri dan juga pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Potensi produk agroforestri yang ada di desa ini adalah Getah Jelutung. Saat ini tidak kurang dari 300 Ha tanaman Jelutung terdapat di desa ini. Penanaman Jelutung berasal dari program rehabilitasi lahan pada tahun 2010 hingga 2013 yang lalu (Lisnawati, 2021).

Lanskap Hutan Desa Sungai Beras

Desa Sungai Beras merupakan desa yang dihimpit oleh berbagai tipe penggunaan lahan. Pada sisi timur terdapat Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh. Pada sisi barat terdapat

konsesi PT. Wirakarya Sakti Distrik II. Pada sisi utara mengarah ke timur terdapat HGU perkebunan kelapa sawit. Pada kawasan HLG, keanekaragaman hayati masih tinggi karena hutan alamnya masih terjaga (BRG, 2017; Maftuchin, 2017). Sedangkan pada lokasi PT. Wirakarya Sakti telah mengalami penurunan keanekaragaman hayati akibat konversi lahan. Jenis-jenis kayu khas gambut.

Struktur vegetasi yang ada di Desa Sungai Beras sesuai dengan jenis penggunaan lahan. Sama seperti keanekaragaman hayati, pada masing-masing penggunaan lahan berbeda pula vegetasinya (Putri dkk., 2022). Jika pada kawasan HLG Sungai Buluh vegetasinya sangat rapat, maka akan berbeda kondisinya dengan kawasan budidaya. Pada kawasan PT. Wirakarya Sakti, vegetasi yang dominan adalah akasia. Sebelum adanya PT. Wira Karya Sakti, lahan yang kini dikelola sebagai HTI oleh PT. Wira Karya Sakti ditumbuhi berbagai jenis vegetasi hutan gambut basah.

Secara umum kondisi hidrologi lahan gambut di Desa Sungai Beras masih relatif baik dibandingkan dengan desa lain di sekitarnya. Khususnya di dalam kawasan HLG. Kondisi ini dikarenakan kawasan HLG ini telah diberikan akses pengelolaannya oleh negara kepada masyarakat Desa Sungai Beras melalui skema Perhutanan Sosial, yakni Hutan Desa Sungai Beras dalam bentuk skema izin pengelolaan kawasan yang didapatkan dari Menteri Kehutanan di tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK/707/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Sungai Beras Seluas \pm 2.200 (Dua Ribu Dua Ratus) ha pada kawasan hutan lindung di Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Sejak mendapatkan izin

Hutan Desa, kegiatan pembukaan lahan baru tidak lagi dilakukan oleh masyarakat. Aktivitas dalam kawasan adalah melakukan perawatan atas lahan yang telah ditanami menjadi kebun.

Bahkan di desa ini terdapat delapan sekat kanal sederhana yang dibangun oleh Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD) pada tahun 2015 lalu. Pembangunan sekat kanal ini dimaksudkan untuk menjaga tinggi muka air lahan gambut di sekitar lokasi sekat kanal. Namun, karena konstruksinya sederhana terbuat dari terpal plastik dan kayu, sekat kanal yang dibuat oleh KPHD ini sangat rentan dari kerusakan.

Pemerintah Desa Sungai Beras memilih skema hutan desa karena berbagai alasan, di antaranya: (1). Desa Sungai Beras berbatasan langsung dengan HLG Sungai Buluh, yang mana sebagian arealnya diajukan menjadi Hutan Desa Sungai Beras. (2). Masyarakat Desa Sungai Beras yang bermukim di sepanjang Sungai Mendahara (bagian hulu sungai) dan memiliki mata pencaharian sebagai petani/pekebun sangat bergantung kepada hutan, terutama terkait ketersediaan air (air sungai dan irigasi) pada musim kemarau, oleh sebab itu Pemerintah Desa Sungai Beras dan masyarakat Desa Sungai Beras memiliki kepentingan agar Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh tetap terjaga. Dengan menjaga hutan, akan menjaga manfaat hutan bagi desa dan masyarakatnya. Selain menjaga pasokan air bagi perkebunan dan sungai, manfaat hutan lainnya seperti hasil hutan non kayu seperti rotan, nipah, jelutung, buah-buahan, madu lebah dan tempat budidaya ikan dan lain-lain. (3). Pemilihan skema hutan desa memungkinkan Pemerintah Desa dan masyarakatnya memiliki peran langsung untuk menjaga kelestarian hutan dan

mendayagunakan potensi non kayu yang ada di dalam kawasan tersebut. Sehingga selain menjaga kelestarian hutan, diharapkan hutan juga dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi masyarakat di desa. (4). Pemilihan skema Hutan Desa juga untuk merespon peraturan pemerintah yang telah mengakomodir kebutuhan Desa Sungai Beras untuk mengelola hutan di sekitarnya.

Mengenai kerentanan ekosistem gambut, ancamannya berasal dari kebakaran lahan. Namun, kerentanan ini berasal dari aktivitas pembukaan lahan gambut yang dilakukan terutama oleh perusahaan yang memanfaatkan lahan gambut dengan diawali membuat kanal agar air gambut dapat dikeringkan. Pengeringan air gambut ini dimaksudkan agar lahan gambut tersebut dapat ditanami. Namun, ternyata hal ini menjadi pemicu keringnya lahan gambut. Keringnya gambut ini menjadikannya mudah terbakar. Saat ini ancaman lainnya dari ekosistem gambut di wilayah desa ini adalah pembukaan lahan secara *illegal* untuk dijadikan kebun dengan cara membakar. Apalagi dari pantauan di lapangan, untuk wilayah Hutan Desa yang berbatasan dengan Desa Sinar Wajo masih rawan terjadi pembukaan lahan. Pembukaan lahan ini apabila tidak diselesaikan akan mengancam kembalinya terbakar lahan gambut di desa ini. Hal menarik lainnya dari desa ini adalah tidak pernah terbakarnya lahan mereka sejak dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (1). Sejak 2015, mulai ada pengawasan yang lebih massif baik dari desa maupun perusahaan yang berkepentingan di lahan gambut. (2). Adanya sosialisasi aturan hukum dan sanksi bagi pembakaran lahan gambut dari desa dan penindakan yang ketat dari perusahaan yang berkepentingan di lahan gambut. (3). Adanya kerjasama antar elemen: pemerintah, swasta dan

masyarakat. Misalnya KPHD, BNPB, dan lain-lain.

Pertema, Adanya sosialisasi dari desa bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat terkait potensi bahaya kebakaran di lahan gambut. Kedua, Adanya peningkatan pemahaman masyarakat akan dampak dari kebakaran hutan dan lahan gambut bagi kehidupan masyarakat secara langsung sehingga muncul kesiagaan untuk saling mengawasi dan mengingatkan antara warga. Ketiga, Tidak terjadi kemarau panjang hampir di seluruh Jawa dan Sumatera sebagaimana yang terjadi pada tahun 2015 yang menyebabkan pasokan air di lahan tetap terjaga sehingga mampu mencegah kekeringan lahan.

PEMBAHASAN

Perhutanan Sosial: Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat

Perhutanan Sosial diatur dalam P.83/Menlhk/ Setjen/Kum.1/10/2016. Perhutanan sosial merupakan mekanisme pengelolaan kawasan hutan yang memberikan ruang kelola bagi rakyat Indonesia terhadap kawasan hutan negara (seluas 12,7 juta ha) (Agusti dkk., 2020; Haryanto dkk., 2021; Januar dkk., 2021; Martin, 2020; Veriasa dkk., 2021; Wiyono, 2021). Perhutanan sosial dilaksanakan dalam empat mekanisme yaitu: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan Kehutanan. Perhutanan sosial memiliki potensi menjadi *trade-off* antara kepentingan sosial (masyarakat), nilai ekonomi, dan lingkungan (Rahmina, 2012). Kepentingan sosial meliputi akses masyarakat pada sumber daya hutan. Konsep perhutanan sosial yang ada di hutan gambut Desa Sungai Beras adalah Hutan Desa (HD). Sehingga, pengelolaannya untuk tujuan perlindungan dan pemanfaatan terbatas.

Dengan konsep hutan desa maka ditunjuk perangkat yang bertanggungjawab atas hutan yaitu Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD) yang di SK-kan oleh desa sebagai pengelola kawasan untuk dipertahankan seluruh potensi, ekosistem dan biodiversity yang ada dalam hutan. Selain KPHD, Desa Sungai Beras memiliki pengawasan dari Masyarakat Pedulu Api (MPA) yang dibentuk oleh KLHK untuk penanganan terhadap hutan yang rawan akan kebakaran. MPA juga berkolaborasi dengan TNI, POLRI, Brigade Penendalian Karhutla KLHK-Manggala Agni, BPBD, dan instansi yang terkait lainnya.

Dalam pengelolaan hutan desa, bukan hanya KPHD yang bertanggungjawab. Akan tetapi desa juga memiliki peran penting sehingga dapat menyalurkan anggaran desa untuk program perhutanan sosial bagi kelompok masyarakat dan juga upaya mendukung perlindungan hutan desa tersebut. Selain itu, pihak ketiga berupa LSM juga dapat ikut andil dalam memfasilitatori masyarakat seperti yang sudah dilakukan KKI WARSI. Melalui WARSI kelompok masyarakat dilibatkan dalam pemanfaatan potensi hutan sebagai konsep dari perhutanan sosial. Beberapa KUPS dibentuk dan juga KTH untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa dan hutan, diantaranya:

Pertema, KTH Senang Jaya fokus untuk Jelutung. Masyarakat yang ada di Desa Sungai Beras memiliki lahan perkebunan baik yang jauh dari hutan maupun yang berada dalam kawasan hutan desa yang sudah terlanjur membuka lahan perkebunan sawit sebelum ditetapkan sebagai hutan desa. Sehingga, masyarakat diminta untuk

menanam tumbuhan Jelutung di sela-sela pohon sawit.

Kedua, KTH Kopi Liberika. Kopi Liberika merupakan tanaman yang ramah akan lahan gambut yang tidak menguras banyak air seperti sawit. Sehingga dapat dikembangkan di lahan gambut. Masyarakat Desa Sungai Beras membentuk kelompok tani untuk menanam kopi ini sehingga dapat menjadi alternatif sumber ekonomi. Lahan kopi liberika ditanam di dekat kawasan hutan.

Ketiga, KWT. Kelompok Wanita Tani (KWT) yang bergerak dalam aspek pemberdayaan perempuan untuk mengembangkan tanaman Rumah Tangga maupun komoditas dagang yaitu pinang. Kelompok ini hanya diperuntukan untuk kaum perempuan. Mereka mengembangkan potensi dalam penyelamatan lingkungan seperti menanam pohon hias di sekitar lingkungan rumah, bunga, dan berkreatifitas membuat kerajinan maupun kuliner.

Keempat, KUPS Pengolahan Pelepah Pinang. Sumber mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Beras selain sawit adalah pinang. Sehingga, banyak tumbuh pohon pinang. Selain buah pinang, pelapah pinang juga dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan dan pengganti piring. Pelepah pinang menggunakan alat khusus dapat diubah menjadi benda pengganti piring yang dapat bertahan kurang lebih sebulan. Hal ini merupakan terobosan yang ramah lingkungan dan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Desa Sungai Beras.

Kelima, KUPS Dodol Nipah dan Garam Nipah. Dengan banyak pohon nipah yang tumbuh disepanjang aliran sungai dapat dimanfaatkan sebagai dodol. Masyarakat memiliki kreatifitas untuk mengolah air nipah menjadi dodol.

Keenam, KUPS Peternakan Ayam Buras. Peternakan ayam buras ini dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan pasokan ayam untuk warga setempat. Hal ini dilakukan karena pasar hanya ada 1 sekali dalam seminggu di Desa Sungai Beras. Sehingga, kebutuhan akan protein daging ayam dapat dipasok melalui peternakan ayam.

Selain KTH dan KUPS, juga ada program mitra dengan universitas, instansi pemerintah dan LSM. Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu IPB dan BRG membuat demplot tanaman lahan gambut yang di buka 3 ha milik lahan masyarakat untuk uji coba tanaman lahan gambut oleh IPB dan BRGM dengan jenis tanaman Nangka, Jengkol, Pete, Alpukat dan diselingi oleh pohon Jelutung. Selain itu, di Desa Sungai Beras, mitra penelitian Kedeputan Penelitian dan Pengembangan, dalam hal ini Institut Pertanian Bogor, membangun plot paludikultur Jelutung yang dikombinasikan dengan tanaman buah-buahan. Program ini memanfaatkan lahan seluas 8.5 ha lahan dalam satu kawasan yang terdiri dari 10 (sepuluh) petani. Namun, lokasi percobaan tanaman ini tidak intensif dirawat dan diawasi oleh masyarakat dan saat sekrang terbengkalai. Menurut Bapak H (70 tahun) keberlanjutan dari pihak IPB maupun BRGM sampai sekarang tidak ada lagi.

Desa Sungai Beras merupakan salah satu desa yang telah mendapatkan pendampingan atau fasilitasi terkait pengelolaan lahan gambut sejak awal tahun 2012 yang lalu. Adalah KKI WARSI yang melakukan kegiatan pendampingan di desa ini melalui program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Selain KKI WARSI juga ada Universitas Jambi yang juga ada kegiatan bersama masyarakat

desa ini. Dalam prosesnya telah ada kegiatan sosialisasi, penyuluhan, diskusi hingga pelatihan tentang pengelolaan lahan gambut berkelanjutan berbasis masyarakat lokal. Sehingga persepsi dan pengetahuan sebagian masyarakat terutama Pemerintahan Desa dan Kelompok Tani Hutan tentang restorasi gambut cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara, responden yang menyambut baik kegiatan restorasi gambut yang dilakukan oleh BRG nantinya. Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan fakta nyata yang membuat masyarakat dengan cepat memahami kenapa restorasi lahan gambut itu diperlukan. Kejadian kebakaran lahan gambut yang pernah ada di desa ini seperti tahun 2011 dan 2014 telah menyebabkan pemilik lahan menderita kerugian. Karena lahan yang terbakar adalah kebun yang sudah berproduksi. Selain itu, dampak lainnya seperti ISPA dan terjadinya penurunan produksi kebun pasca kejadian kebakaran juga menjadi pengetahuan dan pembelajaran tersendiri bagi sebagian masyarakat.

Terkait restorasi gambut, sebelumnya di desa ini telah ada kegiatan pembangunan sekat kanal partisipatif sebanyak delapan unit oleh masyarakat desa. Kegiatan penanaman lahan terdegradasi pada kawasan HLG juga telah dilakukan oleh masyarakat desa ini. Hingga saat ini kegiatan restorasi gambut ini juga masih berjalan di desa ini. Bahkan rencana pengelolaan lahan gambut berupa Rencana Pengelolaan Hutan Desa telah disusun oleh masyarakat desa melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa. Dalam perencanaan tersebut telah memasukkan program perlindungan dan pengamanan Hutan Lahan Gambut (HLG) dari perambahan dan kebakaran, serta program rehabilitasi lahan melalui penanaman tanaman Jelutung, Kopi,

Nanas, Lada dan buah-buahan yang adaptif di lahan gambut.

Dampak dan Tantangan Pengelolaan Hutan Desa

Hutan Desa melalui konsep Perhutanan Sosial memungkinkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk mengendalikan laju kehilangan tutupan hutan (forest cover loss) atau FCL. FCL merupakan salah satu indikator utama perubahan emisi gas rumah kaca dalam sektor kehutanan. Dengan mempertimbangkan variasi tahun pemberian izin pengelolaan pada seluruh kawasan Perhutanan Sosial di Indonesia, parameter rerata *average forest cover loss* (FCL) digunakan sebagai acuan untuk melihat dinamika perubahan tutupan hutan Perhutanan Sosial sebelum dan sesudah izin diberikan.

Khusus lahan pada kawasan HLG yang saat ini menjadi Hutan Desa sedang disusun perencanaan tata guna lahannya. Secara umum dalam perencanaan tersebut dibagi dalam dua blok atau zona, yakni: 1) Zona pemanfaatan; dan 2) Zona lindung. Zona pemanfaatan yaitu lahan yang sudah dibuka oleh masyarakat. Namun, dalam pengelolaannya dilarang menambah bukaan baru. Khusus untuk kebun yang ditanami Kelapa Sawit, maka diizinkan untuk pemanfaatan hingga satu daur produksi. Setelah itu harus diganti atau diremajakan dengan tanaman berkayu. Sedangkan untuk zona lindung adalah zona yang masih hutan alam.

Hal ini bertujuan untuk upaya perlindungan hutan desa dari ancaman pembukaan lahan dan konflik. Namun untuk Desa Sungai Beras menurut PLHD Bapak H (60 Tahun) bahwa luas hutan desa yang awalnya 2.200 ha di dalamnya sudah terdapat sekitar 700 ha bukan hutan. Artinya, sekitar 400 terkena dampak kebakaran sejak tahun 2015

hingga 2020. Kemudian sekitar 300 ha lahan merupakan lahan perkebunan sawit masyarakat yang merupakan terlanjur dibuka sebelumsk penetapan hutan desa. Sehingga, pada saat ini tidak dapat dikembalikan menjadi hutan karena sudah ditanami oleh masyarakat. namun untuk penambahan dan perluasan kebun memang tidak bisa dan terus diawasi. Akan tetapi, masyarakat terus mencoba untuk memperluas lahan mereka dan menanam sawit. Walaupun sudah diperingati.

Baru-baru ini, terjadi penebangan pohon Jelutung di salah satu kebun masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan desa sebanyak 40 batang. Hal ini dilakukan dengan sengaja oleh pemilik kebun karena dianggap mengganggu pohon sawitnya. Padahal masyarakat yang sudah terlanjur membuka kebun sawit di dalam kawasan hutan lindung diharuskan menanam pohon jelutung di dalam kebunnya sebagai bentuk penghijauan dan tujuan fungsi hutan. Namun, masih tetap juga dilakukan penembangan dengan alasan ketidaktahuan.

Sama seperti desa sekitar hutan lainnya, desa ini juga memiliki konflik lahan dengan perusahaan dan hutan lindung. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan yang pernah masuk ke Desa Sungai Beras pada tahun 1980an yaitu perusahaan Betara Timber dan Betara Induk.

Selanjutnya disusul PT. WKS pada tahun 1990an. Pada tahun 2004, PT WKS melakukan kerjasama melalui pola kemitraan dengan masyarakat Sungai Beras melalui Kelompok Tani Suka Damai. Lokasi kemitraan berada di Teluk Perancis. Kelompok Tani ini berjumlah 20 orang.

Konflik antara masyarakat dan PT. WKS terjadi dikarenakan PT. WKS melakukan penebangan di areal lokasi Kelompok Tani. Tumpang tindih

kepemilikan lahan oleh Kelompok Tani dan PT WKS menjadi pemicu pecahnya konflik ini. Tidak saja tanaman yang dilakukan penebangan tetapi juga PT. WKS merobohkan pondok-pondok masyarakat. Persoalan itu akhirnya berujung di meja Kepolisian. Hingga saat ini persoalan itu tidak selesai secara tuntas. Kelompok Tani hanya memiliki bukti tanaman di lokasi ini dan mereka tidak memiliki sertifikat, hanya bermodalkan Surat Keterangan Tanah (SKT) saja. Tidak saja Kelompok Tani yang memiliki tanah di lokasi itu, kabarnya anggota DPRD juga memiliki lahan di lokasi yang sama, Teluk Perancis. Masyarakat terutama Kelompok Tani selanjutnya difasilitasi Persatuan Petani Jambi (PPJ) menuntut PT. WKS. Syamsuddin, adalah donasi yang selalu mensponsori berbagai kegiatan demonstrasi untuk melawan PT. WKS. Samsuddin adalah masyarakat desa Sungai Beras yang juga merupakan Toke besar kopra sanggup mendatangkan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar persoalan lahan dengan PT. WKS dapat segera diselesaikan. Akan tetapi persoalan hanya persoalan tanpa ada penyelesaian hingga sekarang.

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang telah dikuasai/dibebani hak pengelolaan oleh badan usaha selama jangka waktu tertentu untuk di produksi hasil hutannya dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada Desa Sungai Beras, Hak Penguasaan Hutan (HPH) dipegang oleh PT. WKS. HPH merupakan bentuk penguasaan lahan selama waktu tertentu dalam jumlah yang besar oleh perusahaan. Sampai saat ini belum tampak kontribusi besar keberadaan HPH terhadap pembangunan desa sebagai penguasa lahan dalam jumlah yang besar. Sampai saat ini keberadaan PT. WKS menimbulkan Konflik di Desa Sinar

Wajo, sama seperti desa-desa lainnya yang memiliki konsesi ijin PT. WKS.

Konflik bermula dari penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT. WKS pada lahan-lahan masyarakat. PT. WKS menanam akasia di Desa Sungai Beras sejak tahun 2009. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang berfungsi sebagai pelindung ekosistem yang ada, merupakan daerah tangkapan air, tempat hidup bermacam flora dan fauna dan apabila terganggu/rusak akan menimbulkan bencana bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Di Desa Sungai Beras terdapat Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang merupakan bentuk lahan yang dikuasai oleh Negara. Namun, banyak dari masyarakat yang berada di sekitar Hutan Lindung Gambut belum memahami apa fungsi dan manfaat dari keberadaan Hutan Lindung Gambut yang berada di sekitar desa mereka, sehingga sampai saat ini masih ada beberapa kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas perladangan di dalam kawasan tersebut.

SIMPULAN

Konsep perhutanan sosial dimulai dari tahun 1978 sebagai “hutan untuk masyarakat” (forestry for people). Di dekade 1990-an, ide Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) mulai mendunia, hingga dimulainya era baru pengelolaan hutan sejak era reformasi. Perhutanan sosial merupakan konsep yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kehadiran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Paradigma ini dapat dikaitkan dengan pembukaan hutan (deforestasi) besar-besaran yang dilaksanakan dalam bentuk alokasi lahan untuk transmigrasi dari pulau Jawa ke Sumatera dan Kalimantan. Bersama dengan itu pembukaan hutan dilaksanakan untuk

tujuan korporasi besar. Sehingga akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam (hutan) semakin berkurang; yang menimbulkan konflik horizontal dan konflik tenurial. Tetapi, pengelolaan lahan gambut berbasis perhutanan sosial masih sangat terbatas dan mendapatkan kendala-kendala.

Ditengah menciutnya ruang kelola masyarakat akibat pembangunan kehutanan dan perkebunan berbasis korporasi, perhutanan sosial merupakan mekanisme pengelolaan kehutanan yang memberikan ruang kelola (akses) kepada masyarakat. Pemanfaatan hutan berdasarkan perhutanan sosial disesuaikan dengan fungsinya yaitu produksi dan lindung; yaitu menyediakan produk kayu, non kayu, dan jasa lingkungan lainnya. Maka dari itu munculnya peraturan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan konsep perhutanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok
- Agusti, T. M., Nurjaya, I. N., & Kuswahyono, I. (2020). Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial yang Berkemampuan bagi Masyarakat Sekitar Hutan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 300. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p300-309>
- Agustini, S., Dharmawan, A. H., & Putri, E. I. K. (2018). Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 3(2), 267.

- <https://doi.org/10.31292/jb.v3i2.129>
- BPS. (2023). Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- BRG. (2017). Laporan Pemetaan Sosial Desa Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Restorasi Gambut
- Creswell, W. J. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Januar, R., Daeli, W., Tobing, S., dan Firmansyah, R. *Hutan Desa dan Deforestasi di Indonesia: Analisis Studi Kasus Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial di Jambi*. WRI Indonesia. Tersedia online di: <https://doi.org/10.46830/wriprn.19.00131>
- Januar, R., Daeli, W., Tobing, S., & Firmansyah, R. (2021). Hutan Desa dan Deforestasi di Indonesia: Analisis Studi Kasus Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial di Jambi. WRI
- Kepala Desa. (2019). Profil Desa Sungai Beras. Kantor Desa Sungai Beras.
- Lisnawati, Y., & Nasrul, B. (2021). *Pembelajaran Restorasi Gambut dari Region Sumatera* (Cetakan pertama). PT. IPB Press. Bogor
- Maftuchin, A. (2017). Manajemen Pengelolaan Hutan Gambut dan Pembangunan Lokal Berbasis Multietnis di Sungai Beras, Mendahara Ulu, Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pluralisme, Multikulturalisme dan Batas-Batas Toleransi.
- Martin, E. (2020). Hutan Desa: Menghadirkan Negara dalam Tata Kelola Lokal. Dalam S. Suharti, S. Ekawati, & S. Anwar (Ed.), *Bersama membangun perhutanan sosial*. IPB Press
- Nurjanah, S., Octavia, D., Kusumadewi, F. (2013). *Identifikasi Lokasi Penanaman Kembali Ramin (Gonystylus bancanus Kurtz) di Hutan Rawa Gambut Sumatera dan Kalimantan*. Forda Press Bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan International Tropical Timber Organization (ITTO)-CITES Phase-2 Project. Bogor. Diakses dari: https://cites.org/sites/default/files/ndf_material/The%20assessment%20of%20ramin%20plantation%20requirement%20Technical%20report%20Indonesian.pdf
- Nurjanah, S., Octavia, D., & Kusumadewi, F. (2013). *Identifikasi Lokasi Penanaman Kembali Ramin di Hutan Gambut Sumatera dan Kalimantan*. Forda Press. Bogor
- Pemerintah Provinsi Jambi. (2015). Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014. Pemrov Jambi. Diakses dari: <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=ebook&code=s&view=yes&id=544>
- Putra, E. I., Ramadhi, A., Shadiqin, M. F., Saad, A., Setianto, E., Nurhayati, A. D., Saharjo, B. H., & Cochrane, M. A. (2022). Assessing the severity of forest fire in Sungai Buluh Protected Peat Forest, Jambi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 959(1), 012059. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/959/1/012059>

- Putri, A. I., Syaufina, L., & Puspaningsih, N. (2022). Ground Water Level as an Indicator of Fire in Tanjung Jabung Timur, Jambi Province. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. 12(4), 749–756. <https://doi.org/10.29244/jpsl.12.4.749-756>
- Rahmina, R. (2012). *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme (FORCLIME). Jakarta. Diakses dari: <https://www.forclime.org/documents/Books/Buku%20Skema%20PBHM%20Final.pdf>
- Sahputri, M., & Afrila, D. (2020). Analisis Pendapatan Petani Pinang di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *SJEE (Scientific Journals of Economic Education)*, 4(2), 40–47. <http://dx.doi.org/10.33087/sjee.v4i2.83>
- Spradley, P. J. (2006). *Metode Etnografi*. Tiara Wacana. Yogyakarta
- Veriasa, T. O., Maulana, S. J., & Hariyadi, C. (2021). *Perhutanan Sosial, Asa Menjaga Sumber Daya Bersama: Kumpulan Studi dan Pembelajaran di Indonesia*. IPB Press. Bandung
- Wiyono, W. (2021). Kunci Keberhasilan Program Perhutanan Sosial dan Peran Penting Penyuluhan Kehutanan. Dalam S. S. Hariadi & S. Subejo (Ed.), *Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Perspektif Teoritis dan Praktis* (hlm. 175–197). Penerbit Impulse
- Zainuddin, Z., Rosyani, R., & Haryadi, B. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut di Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang Provinsi Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 1(1), 16–39. <https://doi.org/10.22437/jpb.v21i1.5101>